

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Perbedaan harga tiket masuk bagi wisatawan domestik dan wisatawan asing pada objek wisata merupakan suatu bentuk diskriminasi. Dalam hal ini, yang dijadikan dasar pembedaan adalah kewarganegaraan dari wisatawan. Pembedaan tersebut mengakibatkan berkurangnya hak asasi wisatawan asing untuk berkembang secara layak sebagaimana tujuan wisata adalah untuk pengembangan pribadi. Larangan tentang diskriminasi terhadap orang asing secara tegas diatur oleh ICERD yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Lebih lanjut, larangan tentang tindakan diskriminatif juga terdapat dalam UU HAM dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Taman Hutan Raya Djuanda merupakan salah satu objek wisata di Kota Bandung yang menerapkan pembedaan harga bagi wisatawan domestik dan wisatawan asing. Pengelola dari Taman Hutan Raya Djuanda adalah pemerintah daerah. Dari segi pelaku usaha, pihak pengelola objek wisata berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam UU Kepariwisata dan UU Perlindungan Konsumen. Perbedaan harga yang terjadi di Taman Hutan Raya Djuanda juga kontradiksi dengan sikap Pemerintah Kota Bandung yang berkomitmen mengusung konsep *Human Right City*, dimana HAM memainkan peran utama sebagai prinsip-prinsip yang mendasar.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2013 yang memuat harga tiket masuk Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda merupakan peraturan yang sah karena dihasilkan melalui proses perundangan yang sah. Namun, peraturan tersebut memiliki beberapa inkonsistensi dengan peraturan di atasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, kewarganegaraan wisatawan tidak termasuk sebagai dasar dalam menentukan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Dalam hal ini, yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan tarif tersebut adalah jenis, kapasitas/jumlah dan lamanya pemakaian. Lebih lanjut, pembedaan harga tersebut bertentangan dengan prinsip non diskriminasi sebagai prinsip HAM yang banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## **6.2. Saran**

Objek wisata harus menerapkan harga yang sama bagi wisatawan domestik dan wisatawan asing sebagai bentuk pelaksanaan prinsip non diskriminasi sebagai prinsip HAM. Dalam hal ini, diskriminasi terhadap orang asing dapat dibenarkan apabila berupa hal-hal seperti larangan kepemilikan tanah ataupun larangan ikut pemilihan umum, namun merupakan problematika apabila berupa pembedaan harga tiket masuk objek wisata. Objek wisata di Indonesia hendaknya mencontoh objek wisata di negara-negara maju yang melakukan diskriminasi positif dengan memberikan harga yang lebih murah bagi wisatawan anak-anak dan lanjut usia. Diskriminasi positif seperti itu lebih adil daripada sekedar membedakan harga berdasarkan asumsi orang asing mempunyai lebih banyak uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Bungaran Antonius Simanjuntak, et.al., Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia, Yayasan Pustaka Obor, 2017.

Christophe Dorigné-Thomson , WNI Dilarang Baca!, B First, Yogyakarta, 2015

Daisuke Shirane, ICERD and CERD: A Guide for Civil Society Actors, The International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism, 2011.

Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.

Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.

I Gusti Bagus Rai Utama, Pemasaran Pariwisata, Penerbit Andi Offset, 2017.

I Gusti Bagus Rai Utama, Pengantar Industri Pariwisata Tantangan & Peluang Bisnis Kreatif, Penerbit Deepublish, 2016.

I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Mochtar Kusumaatmadja et al., Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2015.

Ni'Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.

P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2015.

Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual, IMR Press, Cianjur, 2012.

Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 2017.

**Jurnal :**

Erry Sukriah, Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan Kota Bandung Tourism as Potential Sector in Bandung, Jurnal Manajemen Resort dan Leisure Vol. 11 No. 1, 2014.

Hendri Sayuti, Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan), Jurnal Menara Kewirausahaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol 12, No. 1, 2013.

I Nyoman Alit Adiana, Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Asing Dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan, Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, Vol. 01, No. 05, Juli 2013.

Kurniawan Kunto Yuliarso, Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju Democratic Governances, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Volume 8, Nomor 3, Maret 2005.

Muhammad Galuh Yudhistira, et.al, Analisis Daya Tarik Kota Bandung Sebagai Destinasi Pariwisata Berdasarkan Memorable Tourism Experiences, Jurnal e-Proceeding of Management Vol.3 No. 2 Agustus 2016.

Sarsiti, Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata (Studi di Kabupaten Purbalingga), Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 12 No. 1 Januari 2012.

**Website :**

<https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2017/08/29/119/-jumlah-akomodasi-hotel-menurut-klasifikasi-di-kota-bandung-2016.html>

<https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2017/08/29/121/-jumlah-restoran-rumah-makan-di-kota-bandung-2016.html>

<https://geotimes.co.id/opini/kenapa-kita-suka-memeras-bule/>

<https://kbbi.web.id/bulai>

<https://properti.kompas.com/read/2018/02/25/182046621/ini-10-kota-termacet-di-indonesia>

<https://news.detik.com/berita/d-2166927/ada-diskriminasi-soal-tiket-masuk-borobudur-bule-prancis-protos>

<https://reserve.tokyodisneyresort.jp/en/ticket/search/>

<https://travel.kompas.com/read/2011/10/21/1652035/jangan.pilih.kasih.antara.turiss.domestik.dan.turis.asing>

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/08/01/1474/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-juni-2018-mencapai-1-32-juta-kunjungan.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51c0614a21851/uji-materiil-peraturan-gubernur>

<https://www.nativeindonesia.com/taman-hutan-roya-juanda-bandung-wisata-hutan-dekat-kota/>

<https://www.thethailandlife.com/thai-price-farangs-dual-pricing>

<https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Destinations-cTop-g1>